

ABSTRAK

Desa Ponggok merupakan fenomena desa yang menarik untuk diamati saat ini. Upaya pembangunan dibidang perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah desa Ponggok ternyata sudah lama dilaksanakan, meskipun pada akhirnya terbukti belum mampu meningkatkan perekonomian desa. Pada tahun 2009, pergantian pemerintah desa yang baru menginisiasi program kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri yang bertujuan untuk mengelola/memanfaatkan potensi desa. BUMDes Tirta Mandiri dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat melalui Musyawarah Desa. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri dan tentang strategi upaya peningkatan di bidang perekonomian Desa Ponggok. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui observasi, in-dept interview, dan pendokumentasian. Metode analisis data diawali dengan reduksi data, setelah itu penyajian data dan diakhiri dengan verifikasi/penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BUMDes Tirta Mandiri mampu menjadi lembaga perekonomian yang berhasil memanfaatkan potensi yang ada di Desa Ponggok. Selain itu, peran pemerintah desa menjadi penentu dalam implementasi kebijakan. Tidak hanya itu saja, Desa Ponggok mempunyai strategi dalam upaya untuk meningkatkan hasil perekonomian dari BUMDes Tirta Mandiri setiap tahunnya. Penelitian ini meminjam teori Merillee S. Grindle tentang Implementasi Kebijakan. Penekanan teori tersebut pada penelitian ini adalah keterlibatan aktor dalam implementasi kebijakan tidak lepas dari kepentingan dari pelaksana didalam implementasinya. Fokus penelitian ini ada tiga, yang pertama aktor yang menjadi penggerak program BUMDes Tirta Mandiri. Kedua, tentang karakteristik lembaga pemerintah desa yang memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan BUMDes. Ketiga, tentang kepatuhan pelaksana BUMDes Tirta Mandiri. Pada proses implementasi kebijakan, BUMDes Tirta Mandiri mempunyai faktor yang mempengaruhi. Adanya kepentingan aktor pelaksana kebijakan yang memengaruhi hasil kebijakan tersebut. Karakteristik lembaga pemerintah desa berpengaruh terhadap hasil implementasi, lembaga yang terbuka cenderung mendorong pelaksanaan kebijakan. Dalam mendorong kepatuhan pelaksana kebijakan, pemerintah desa mengadakan evaluasi dan juga adanya Laporan Pertanggungjawaban melihat pelaksanaan kebijakan. Peran dan respon pemerintah desa berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan Badan Usaha Milik Desa.

Kata Kunci: *Implementasi kebijakan, BUMDes*

ABSTRACT

Ponggok village is an interesting village phenomenon to be observed at this time. Economic development efforts undertaken by the village government of Ponggok have long been implemented, although in the end proved not able to improve the village economy. In 2009, the change of the new village government initiated the policy program of Village Owned Enterprises (BUMDes) Tirta Mandiri which aims to manage / exploit the potential of the village. BUMDes Tirta Mandiri was formed by village government and community through Village Deliberation. This study examines the implementation of the policy of the Tirta Mandiri Village Owned Enterprise and the strategy of improvement efforts in the economic field of Ponggok Village. This research methodology uses a qualitative approach, by collecting data through observation, in-dept interview, and documentation. Data analysis method begins with data reduction, after which the data presentation and end with verification / withdrawal conclusion. The results showed that the implementation of the policy BUMDes Tirta Mandiri able to become an economic institution that successfully exploit the potential in Ponggok Village. In addition, the role of village government becomes a determinant in policy implementation. Not only that, Ponggok Village has a strategy in an effort to improve the economic output of BUMDES Tirta Mandiri every year. This research borrows Merilee S. Grindle's theory of Policy Implementation. The emphasis of the theory on this research is the involvement of actors in the implementation of the policy can not be separated from the interests of the implementers in implementation. The focus of this research there are three, the first actors who became the driver of the program BUMDes Tirta Mandiri. Second, about the characteristics of village government institutions that have an influence on the implementation of BUMDes policies. Third, about the implementation of BUMDD Tirta Mandiri. In the policy implementation process, BUMDES Tirta Mandiri has influencing factors. The existence of the interest of the policy implementing actor affecting the outcome of the policy. Characteristics of village government agencies affect the outcome of implementation, open institutions tend to encourage the implementation of policies. In encouraging policy compliance, the village government conducts an evaluation as well as an Accountability Report to see the implementation of the policy. The role and response of the village government has an effect on the implementation of the policy of the Village Owned Enterprise.

Keywords: Implemenasi policy, BUMDes